BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menempatakan tanah pada kedudukan yang penting. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dijajah selama 350 tahun oleh kolonial Belanda, menunjukan indikasi bahwa tanah sebagai milik bangsa Indonesia telah diatur oleh bangsa lain dengan sikap dan niat yang asing bagi kita. Tanah sebagai berkah Ilahi telah menjadi sumber keresahan dan penindasan rakyat. Rakyat ditindas melalui politik dan hukum pertanahan yang tidak berkeadilan, demi kemakmuran bangsa lain. Oleh karena itu setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Maka bangsa Indonesia mengatur sendiri tanah yang telah dikuasai dan dimiliki.Akan tetapi mengatur tanah yang telah dikuasai dan dimiliki sendiri itu tidakalah mudah, walaupun telah tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang merupakan landasan ideal hukum Agraria Nasional yang menetapkan bahwa : "Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat". Atas landasan ideal ini sesuai falsafah pancasila, bangsa Indonesia memandang tanah sebagai karunia Tuhan yang mempunyai sifat magis-religius harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatakan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagi alat spekulasi orang atau masyarakat, karena kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuagan perorangan atau golongan melainkan perjuangan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria atau dikenal juga sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang memuat kebijakan Pertanahan Nasional (*National Land Policy*) yang menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan tanah di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan Hak-Hak Atas Tanah (*Land Tenure and Land Ringht*) diperlukan lembaga pendaftaran tanah untuk memberikan kepastiaan hukum antar pemegang hak dengan tanah, peralihan hak tanah, hak tanggungan atas tanah, peralihan hak tanggungan. Selain itu pendaftaran tanah merupakan sumber informasi untuk membuat keputusan dalam pengelolaan pertanahan baik dalam penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Sejalan dengan perkembangan majunya arus teknologi, informasi dalam pembangunan perekonomian indonesia baik dalam sektor formal maupun dalam sektor informal maka dalam hal ini dapat berdampak pada permintaan akan pembuatan sertifikat akta tanah, dimana tanah merupakan salah satu aktiva tetap berwujud yang nilainya terus-menerus bertambah dari tahun ketahun. Permintaan yang terus bertambah akan kebutuhan tanah tidak dibarengi dengan tersedianya pengadaan dan pemanfaatan akan luas lahan tanah tersebut.

Seperti halnya perusahaan, Instansi pemerintahan pun tidak dapat terlepas dari transaksi-transaksi keuangan khususnya Pendapatan negara. Disini akuntansi sangat berperan dalam menentukan maju mundurnya baik disuatu perusahaan maupun dalam Instansi pemerintahan. Sedangakan unsur utama dari Pendapatan negara terdiri dari lima unsur penerimaan yaitu ;

1. Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam
2. Penerimaan Pajak
3. Penerimaan Bukan Pajak
4. Bantuan Program dan
5. Bantuaan Proyek

Berkaitan dengan kegiatan akuntansi yang dilakukan dibidang Pendapatan pada pembuatan sertifikat akta tanah dikantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kotamadya Sukabumi yang merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang tidak bertujuan mencari laba *(Non Profit Oriented*) tetapi lebih menitik beratkan pada pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini akuntansi pemeritahan juga melakukan pencatatan, penggolong-golongan, peringkasan, pelaporan, dan penafsiran yang terjadi dalam transaksi-transaksi keuangan negara.

Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, BPN yang merupakan lembaga pemerintahan Non Departemen memiliki peranan dan fungsi otorisasi dalam mengelola keuagan negara, khususnya pengelolaan yang berkaitan dengan Pendapatan/pemasukan terhadap anggaran dan belanja Negara (APBN). Salah satu Pendapatan negara tersebut berasal dari pembuatan Sertifikat Akta Tanah yang merupakan produk utama dari BPN. Dilihat dari peranan utama BPN dalam menyumbangkan pemasukan bagi anggaran kas negara dari sektor bukan pajak,maka kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan pemberiaan Sertifikat Akta Tanah dalam menunjang hak-hak rakyat dari golongan ekonomi lemah, diantaranya ;

1. Kurang adanya sosialisasi peraturan pertanahan kepada masyarakat, badan hukum, pengusaha/investor, serta pihak-pihak yang terkait.
2. Kurangnya peningkatan dan pengembangan peran serta kelompok masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, dan organisasi profesi.
3. Efektifitas waktu pembuatan Sertifikat Akta Tanah hingga diumumkan.
4. Prosedur pencairan uang didasarkan pada PO (Proyek) dan DIK (Daftar Isian Kegiatan) setelah menunggu penyelesaian gambar tanah.

Sesuai dengan uraian penulis diawal mengenai Pendapatan negara yang diperoleh dari produk utama BPN, yang juga merupakan penerimaan anggaran negara dari sektor bukan pajak yang memberikan kontribusinya bagi pemasukan kas negara,dan kendala-kendala yang penulis temui dilapangan maka penulis tertarik untuk mengambil judul "**Sistem Pencatatan Pendapatan Pembuatan Sertifikat Akta Tanah Pada BPN Kotamadya Sukabumi**".

1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya kuliah kerja praktek ini yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainya di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan manusia Indonesia dalam upaya pembangunan yang berkualitas dan mampu berperan aktif sebagai tenaga yang menjunjung Profesionalisme yang sesuai dengan bidangnya diberbagai sektor pembangunan.

Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka dunia pendidikan dan lembaga pendidikan ketrampilan khususnya dapat menciptakan suatu program pembinaan

sumber daya manusia agar mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan,dan mengaplisikasikannya didunia kerja yang sesungguhnya.

Adapun tujuan kuliah kerja praktek yang telah penulis laksanakan diantaranya sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui sistem pencatatan Pendapatan pada Pembuatan Sertifikat Akta Tanah.
2. Untuk mengetahui fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pencatatan pendapatan negara pada Pembuatan Sertifikat Akta Tanah.
3. Untuk mengetahui penyelesaian atas hambatan-hambatan dalam Pencatatan Pendapatan pada Pembuatan Sertifikat Akta Tanah.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek.

Sedangkan kegunaan dari kuliah kerja praktek ini adalah ;

a).Bagi Penulis

1. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai sistem pencatatan Pendapatan pada Pembuatan Sertifiakt Akta Tanah.
2. Menambah serta mengembangkan serta memantapkan sikap Profesionalisme yang berguna bagi penulis untuk memasuki lapangan kerja sesuai dengan bidangnya.
3. Dapat mempraktekan dan membandingkan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh diperkuliahan dan dapat mengembangkan daya pikir penulis dalam pembutaan laporan ini.

b).Bagi BPN.

Hasil kerja praktek ini dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan kinerja BPN sebagai salah satu lembaga pelayanan masyarakat, khususnya dalam bidang pembuatan SertifikatAkta.

c).Bagi Universitas

Hasil kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Sistem Pencatatan Pendapatan Pembuatan Sertifikat Akta Tanah pada BPN Kotamadya Sukabumi.

1.4 Metode Penelitian

Adapun metode kuliah kerja praktek yang penulis terapkan dilapangan adalah metode deskriptif yaitu penulis berusaha menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan selama 25 hari mulai hari senin sampai dengan jumat berdasarkan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data, menyusunnya, menjelaskan serta menganalisa untuk kemudian menyimpulkanya. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara;

1. Di Lapangan.

Dengan melakukan usaha untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pencatatan Pendapatan pada Pembuatan Sertifikat Akta Tanah yang diperlukan sebagai bahan penyusunan dan penganalisisan berdasarkan ilmu pengetahuan yang penulis miliki dengan cara ;

a). Observasi (Pengamatan)

Penulis mengamati tentang hal yang berkaitan dengan Pendapatan pada pembuatan sertifikat akta tanah di BPN Kotamadya Sukabumi.

b). Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data-data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pendapatan.

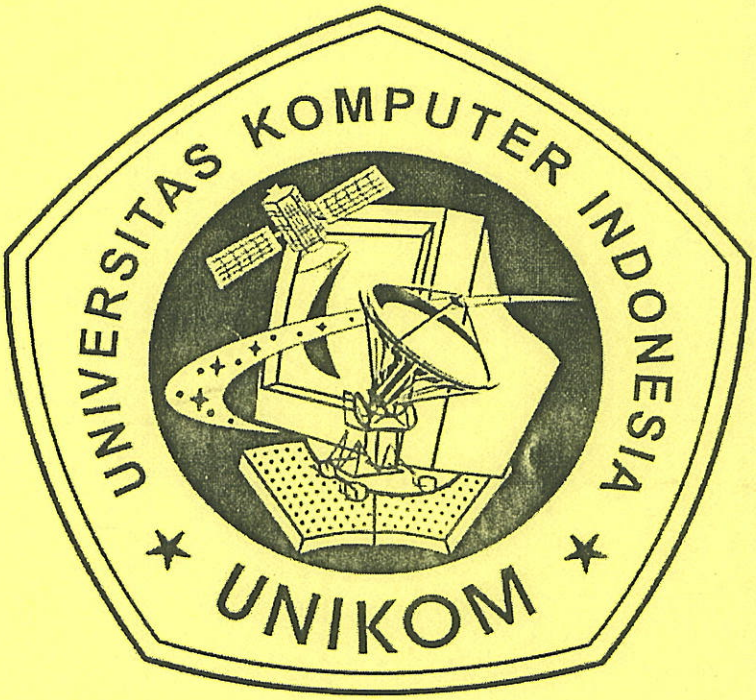
2. Penelitian Kepustakaan

Mendapatkan buku pendukung sebagai bahan tinjauan pustaka dan penganalisisan penulis dalam pembahasannya.

1.5. Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek.

Penulis melaksanakan Kerja Kuliah Praktek Lapangan pada BPN Kotamadya Sukabumi, yang beralamat di Jalan Siliwangi No.39 Telp (0266) 221190, fax (0266) 218724 Sukabumi 43143. Selama kurang lebih 25 hari kerja, waktu pelaksanaan kerja praktek yang penulis laksanakan sesuai dengan keinginan dari pihak BPN Kotamadya sukabumi yaitu :

Waktu pelaksanaan Kerja Praktek Dimulai dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 19 september 2003 hari kerja senin – jumat, waktu kerja mulai pukul 7.30 wib - 15.00 wib.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM